

## Undang-Undang

| No. | Regulasi            | Mengenai   | Keterangan  |
|-----|---------------------|--|-------------|
| 1.  | UU No.10 Tahun 2016 | PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG | 90 Halaman  |
| 2.  | UU No.7 Tahun 2017  | PEMILIHAN UMUM   | 590 Halaman |

## Peraturan Presiden

| No. | Regulasi              | Mengenai   | Keterangan |
|-----|-----------------------|--|------------|
| 1.  | Perpres 68 Tahun 2018 | KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ KOTA | 24 Halaman |

## Peraturan Pemerintah

| No. | Regulasi                               | Mengenai   | Keterangan |
|-----|--|--|------------|
| 1.  | Peraturan menteri b/36/m.sm.00.00/2018 | KETENTUAN BAGI ASN YANG SUAMI ATAU ISTRINYA MENJADI CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH, CALON ANGGOTA LEGESLATIF, DAN CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN | 2 Halaman  |

## Peraturan Daerah

| No. | Regulasi                             | Mengenai  | Keterangan |
|-----|--------------------------------------|---|------------|
| 1.  | Peraturan walikota Nomor 55 Thn 2018 | TENTANG PEMASANGAN APK DAN PENYEBARAN APK PEMILU 2019 | 13 Halaman |

## Perbawaslu Tahun 2017

| No  | Peraturan Bawaslu | Mengenai  | Keterangan  |
|-----|-------------------|---|-------------|
| 1.  | 1 Thn 2017        | Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, panitia pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan pengawas pemilihan umum luar negeri  | 45 Halaman  |
| 2.  | 2 Thn 2017        | Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum dilingkungan Badan Pengawasan Pemilu   | 9 Halaman   |
| 3.  | 3 Thn 2017        | Tata cara pembentukan Badan Pengawas Pemilu   | 19 Halaman  |
| 4.  | 4 Thn 2017        | Laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dilingkungan Badan Pengawas Pemiliha Umum   | 10 Halaman  |
| 5.  | 5 Thn 2017        | Sistem Informasi manajemen kepegawaian dilingkungan sekretariat jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum   | 15 Halaman  |
| 6.  | 6 Thn 2017        | Kode etik Badan Pengawas Pemilihan Umum   | 24 Halaman  |
| 7.  | 7 Thn 2017        | Pedoman penyelesaian ganti kerugian Negara akibat kekurangan perbendaharaan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum  | 30 Halaman  |
| 8.  | 8 Thn 2017        | Tata cara penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintah dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum  | 15 Halaman  |
| 9.  | 9 Thn 2017        | Pengawasan Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota  | 35 Halaman  |
| 10. | 10 Thn 2017       | Pengawasan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota   | 23 Halaman  |
| 11. | 11 Thn 2017       | Pengawasan dana kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota  | 21 Halaman  |
| 12. | 12 Thn 2017       | Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota   | 33 Halaman  |
| 13. | 13 Thn 2017       | Tata cara penanganan pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan massif dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.  | 67 Halaman  |
| 14. | 14 Thn 2017       | Penanganan laporan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota  | 57 Halaman  |
| 15. | 15 Thn 2017       | Tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota   | 76 halaman  |
| 16. | 16 Thn 2017       | Logo, pataka, mars, dan pakaian dinas dilingkungan badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, dan badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota  | 68 halaman  |
| 17. | 17 Thn 2017       | Tata naskah dinas badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, panitia pengawas pemilihan kelurahan/desa dan panitia pengawas pemilihan umum luar negri  | 159 Halaman |
| 18. | 18 Thn 2017       | Tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum   | 67 Halaman  |
| 19. | 19 Thn 2017       | Tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antarwaktu badan pengawas pemilihan umum provinsi, badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa, panitia pengawas pemilihan umum luar negeri, dan dan pengawas tempat pemungutan suara | 33 Halaman  |

## Perbawaslu Tahun 2018

| No  | Peraturan Bawaslu | Mengenai   | Keterangan |
|-----|-------------------|--|------------|
| 1.  | 1 Thn 2018        | Pengawasan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota  | 20 Halaman |
| 2.  | 2 Thn 2018        | Pengawasan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota di wilayah Aceh pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada daerah khusus ibukota Jakarta, papua dan papua barat   | 20 Halaman |
| 3.  | 3 Thn 2018        | Pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah  | 26 Halaman |
| 4.  | 4 Thn 2018        | Pemantauan pemilihan umum  | 29 Halaman |
| 5.  | 5 Thn 2018        | Rapat pleno  | 12 Halaman |
| 6.  | 6 Thn 2018        | Pengaturan Netralitas Pegawai Aparatur sipil Negara, anggota tentara nasional Indonesia dan anggota kepolisian negara republik indonesia   | 11 Halaman |
| 7.  | 7 Thn 2018        | Penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan umum   | 91 Halaman |
| 8.  | 8 Thn 2018        | Penyelesaian pelanggaran Administratif pemilihan umum  | 34 Halaman |
| 9.  | 9 Thn 2018        | Sentra penegakkan Hukum terpadu  | 25 Halaman |
| 10. | 10 Thn 2018       | Perubahan atas peraturan Badan pengawas pemilihan umum No.19 tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian dan penggantian antar waktu badan pengawas pemilihan umum provisi badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa, panitia pengawas pemilihan umum luar negeri dan pengawas tempat pemungutan suara | 11 Halaman |
| 11. | 11 Thn 2018       | Perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum No.11 tahun 2017 tentang pengawasan dana kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota   | 5 Halaman  |
| 12. | 12 Thn 2018       | Perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum No.12 Thn 2017 pengawasan kampanye peserta pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota  | 9 Halaman  |
| 13. | 13 Thn 2018       | Pengawasan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota  | 31 Halaman |
| 14. | 14 Thn 2018       | Pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota  | 35 Halaman |
| 15. | 15 Thn 2018       | Pengawasan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam pemilihan umum  | 13 Halaman |
| 16. | 16 Thn 2018       | Pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah  | 39 halaman |
| 17. | 17 thn 2018       | Pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum di luar negeri   | 25 halaman |
| 18. | 18 Thn 2018       | Perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum   | 15 Halaman |
| 19. | 19 Thn 2018       | Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota   | 17 Halaman |
| 20. | 20 Thn 2018       | Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum  | 11 Halaman |
| 21. | 21 Thn 2018       | Pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum  | 24 Halaman |

|     |             |  |            |
|-----|-------------|--|------------|
| 22. | 22 Thn 2018 | Tata cara pemberian keterangan dalam perselisihan hasil di mahkamah konstitusi   | 14 Halaman |
| 23. | 23 Thn 2018 | Pengawasan pencalonan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota | 35 Halaman |
| 24. | 24 Thn 2018 | Pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum  | 55 Halaman |
| 25. | 25 Thn 2018 | Pengawasan pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden   | 19 Halaman |
| 26. | 26 Thn 2018 | Tata cara pemberian bantuan hukum di lingkungan badan pengawas pemilihan umum  | 13 Halaman |
| 27. | 27 Thn 2018 | Perubahan kedua atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum   | 9 Halaman  |
| 28. | 28 Thn 2018 | Pengawasan kampanye pemilihan umum   | 41 Halaman |
| 29. | 29 thn 2018 | Pengawasan dana kampanye pemilihan umum  | 19 halaman |
| 30. | 30 Thn 2018 | Pengawasan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum   | 18 Halaman |
| 31. | 31 Thn 2018 | Sentra penegakan hukum terpadu   | 65 Halaman |
| 32. | 32 Thn 2018 | Sistem klasifikasi keamanan arsip dan akses arsip dinamis di lingkungan badan pengawas pemilihan umum  | 36 Halaman |
| 33. | 33 Thn 2018 | Perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum  | 16 Halaman |

### Perbawaslu 2019

| No | Peraturan Bawaslu | Mengenai  | Keterangan  |
|----|-------------------|---|-------------|
| 1. | 1 Thn 2019        | Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum   | 47 Halaman  |
| 2. | 2 Thn 2019        | Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum   | 65 Halaman  |
| 3. | 3 Thn 2019        | Pengawasan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih Dalam pemilihan umum  | 27 Halaman  |
| 4. | 4 Thn 2019        | Mekanisme penanganan pelanggaran kode etik panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa, dan pengawas tempat pemungutan suara  | 33 Halaman  |
| 5. | 5 Thn 2019        | Perubahan ketiga atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum   | 17 Halaman  |
| 6. | 6 Thn 2019        | Pedoman pembentukan dan kriteria klasifikasi Sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi dan sekretariat badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota  | 26 Halaman  |
| 7. | 7 Thn 2019        | Organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum, sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi, sekretariat badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan sekretariat panitia pengawas pemilihan umum kecamatan   | 131 Halaman |
| 8. | 8 thn 2019        | Perubahan kedua atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 19 tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antar waktu badan pengawas pemilihan umum provinsi, badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa, panitia Pengawas pemilihan umum luar negeri, dan pengawas tempat pemungutan suara | 8 halaman   |
| 9. | 9 Thn 2019        | Perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 1 tahun 2019 tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan  | 26 Halaman  |

|     |             |   |            |
|-----|-------------|---|------------|
|     |             | umum  |            |
| 10. | 10 Thn 2019 | Pengelolaan dan pelayanan informasi public Badan pengawas pemilihan umum, Badan pengawas pemilihan umum provinsi, dan Badan pengawas pemilihan umum kabupaten/Kota  | 62 Halaman |
| 11. | 11 Thn 2019 | Pencabutan beberapa peraturan badan pengawas pemilihan umum bidang pengawasan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota  | 4 Halaman  |
| 12. | 12 Thn 2019 | Pencabutan beberapa peraturan Badan pengawasan pemilihan umum bidang pengawasan pemilihan umum  | 4 Halaman  |
| 13. | 13 Thn 2019 | Pencabutan peraturan badan pengawas pemilihan umum Nomor 13 tahun 2013 tentang tatacara pemberian keterangan dalam perselisihan hasil pemilihan umum di mahkamah konstitusi bagi badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum Provinsi dan badan pengawasan pemilihan umum kabupaten/kota | 4 Halaman  |
| 14. | 14 Thn 2019 | Perubahan atas peraturan badan pengawas pemilu Nomor 10 thn 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati serta Walikota dan wakil walikota.  | 8 Halaman  |

### Perbawaslu 2020

| No  | Peraturan Bawaslu | Mengenai   | Keterangan  |
|-----|-------------------|--|-------------|
| 1.  | 1 Thn 2020        | Tata kerja dan pola hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan, Panitia pengawas Pemilihan umum Kelurahan/Desa, Panitia pengawas pemilihan umum luar negeri dan pengawas tempat pemungutan suara.   | 61 Halaman  |
| 2.  | 2 Thn 2020        | Tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota  | 108 Halaman |
| 3.  | 3 Thn 2020        | Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 1 Thn 2020 tentang Tata kerja dan pola hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan, Panitia pengawas Pemilihan umum Kelurahan/Desa, Panitia pengawas pemilihan umum luar negeri dan pengawas tempat pemungutan suara. | 47 Halaman  |
| 4.  | 4 Thn 2020        | Pengawasan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak lanjutan dalam kondisi non alam Corona virus disease2019 (Covid-19)   | 70 Halaman  |
| 5.  | 5 Thn 2020        | Sentra penegakan hukum terpadu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota  | 28 Halaman  |
| 6.  | 6 Thn 2020        | rencana strategis badan pengawas pemilihan umum tahun 2020-2024  | 49 Halaman  |
| 7.  | 7 Thn 2020        | Jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan pengawas pemilihan umum   | 24 Halaman  |
| 8.  | 8 thn 2020        | Penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota   | 82 Halaman  |
| 9.  | 9 Thn 2020        | Tata cara penanganan pelanggaran Administrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang terjadi secara terstruktur, Sistematis dan massif.  | 89 Halaman  |
| 10. | 10 Thn 2020       | pedoman pengelolaan arsip dinamis dengan rahmat tuhan yang maha esa ketua badan pengawas pemilihan   | 91 Halaman  |

|     |             |   |             |
|-----|-------------|---|-------------|
|     |             | umum republik indonesia   |             |
| 11. | 11 Thn 2020 | klasifikasi arsip   | 63 Halaman  |
| 12. | 12 Thn 2020 | Perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum Nomor 32 tahun 2018 tentang sistem klasifikasi keamanan Dan akses arsip dinamis badan pengawas pemilihan umum                      | 77 Halaman  |
| 13. | 13 Thn 2020 | Tata naskah dinas   | 162 Halaman |
| 14. | 14 Thn 2020 | Jadwal retensi arsip  | 52 Halaman  |
| 15. | 15 Thn 2020 | Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilihan Umum   | 37 Halaman  |
| 16. | 16 Thn 2020 | Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil walikota  | 36 Halaman  |
| 17. | 17 Thn 2020 | Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan wakil gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta Walikota dan wakil walikota | 45 Halaman  |

### Perbawaslu 2021

| No | Peraturan Bawaslu | Mengenai  | Keterangan |
|----|-------------------|---|------------|
| 1. | 1 Thn 2021        | Organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum, sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi, sekretariat badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan sekretariat panitia pengawas pemilihan umum kecamatan | 73 Halaman |

NB : Untuk lebih Jelasnya silahkan membuka

<https://ppid.yogyakartakota.bawaslu.go.id/regulasi>

<https://jdih.bawaslu.go.id/#>